

SURAU DAN SEKOLAH; DUALISME PENDIDIKAN DI BUKITINGGI 1901-1942

IRHAS FANSURI MURSAL

Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jambi

irhasfansuri@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menelusuri penyelenggaraan dualisme pendidikan tradisional dan modern serta dampaknya terhadap masyarakat Bukittinggi pada paruh pertama abad ke-20. *Surau* merupakan lembaga pendidikan tradisional, tempat anak-anak Bumiputra belajar norma adat, etika, sopan santun dan agama Islam. Sekolah formal yang dibangun oleh pemerintah kolonial di Bukittinggi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai rendah. Antusiasme masyarakat Minangkabau terhadap sekolah mengakibatkan kota Bukittinggi menjadi salah satu tujuan untuk mengakses pendidikan modern. Pendidikan dualistik mengakibatkan munculnya intelektual baru Minangkabau yang disebut sebagai “Kaum Muda”. Sejak kehadiran mereka, *surau* mengalami pembaharuan menjadi model pendidikan semi-modern yang disebut madrasah. Di samping itu, fungsi *surau* sebagai salah satu alat kelengkapan adat di setiap *nagari* perlahan-lahan mulai hilang. Antusiasme masyarakat Minangkabau terhadap pendidikan dualistik mendorong lahirnya lembaga-lembaga pendidikan partikelir untuk memenuhi tingginya minat masyarakat Bumiputera terhadap sekolah modern. Tokoh-tokoh Intelektual Religius asal Minangkabau muncul sejak pendidikan dualistik yang dinamis tersebut diselenggarakan.

Kata kunci: *surau*, dualisme dan pendidikan.

ABSTRACT

This thesis entitled “Surau and School: An Educational Dualism in Bukittinggi, 1901-1942” aimed to explore the implementation of both traditional and modern education and its impacts to Minangkabau communities during the first half of 20th century. Surau is a traditional institution of education, as a place for indigenous children learned adat (customary), ethic, and politeness norms as well as Islam. The formal schools which built by colonial government in Bukittinggi were purposed to fulfill the needs of lower-level official. The enthusiasm of Minangkabau communities about these schools made Bukittinggi city became an alternative destination to get access of modern education. The dualistic education effected to emergence of new intellectual in Minangkabau who called the ‘kaum muda’ (rise generation). Since of their presence, surau was reformed to semi-modern education model. Meanwhile, function of surau as an adat’s component at each nagari slowly disappeared. The enthusiasm of Minangkabau communities about dualistic education has stimulated the emergence of private educational institutions to satisfied their interest to modern schools. At least, a number of popular intellectual religious and nasionalist figures from Minangkabau began to emerged since the dualistic education has dynamically implemented.

Keywords: *surau*, dualism and education

PENDAHULUAN

Pada era prakolonial, masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat telah memiliki model pendidikan tradisional yang membentuk karakter orang Minangkabau itu sendiri. Pendidikan tradisional pada masyarakat Minangkabau berlangsung dalam bentuk pendidikan non-formal, yaitu pendidikan di *surau*. *Surau* adalah salah satu wujud kearifan lokal yang telah mengakar di dalam

kehidupan masyarakat adat Minangkabau. *Surau* merupakan sebuah komponen yang inheren, muncul dan berkembang bersama dalam perpaduan adat Minangkabau dan agama Islam selama ratusan tahun. Menurut Gazalba *surau* merupakan tempat (bangunan) peninggalan kebudayaan masyarakat setempat sebelum datangnya agama Islam. *Surau* dalam sistem adat Minangkabau adalah kaum dan suku (Gazalba, 1983: 291). Azra mengatakan

bahwa *surau* sebagai lembaga pendidikan Islam Minangkabau tetap menjadi bagian integral dari ‘memori kolektif’ orang Minangkabau secara keseluruhan. Artinya, *surau* pada masa lalu merupakan simbol yang merepresentasikan nilai-nilai sosial penduduk suatu *nagari*, terlebih setelah agama Islam mengisi rohani mayoritas masyarakat Minangkabau. Lantas *surau* telah lama menjadi simbol masyarakat Minangkabau yang religius (Azra, 2003: vii). Pendidikan di *surau* meliputi pendidikan tradisi atau adat dan pendidikan agama Islam. Pendidikan tradisi meliputi beladiri silat, sastra, seni tari dan musik tradisional Minangkabau; sedangkan pendidikan agama Islam meliputi belajar *Al-Quran*, ilmu fiqih dan ilmu agama lainnya serta praktek ibadah.

Studi ini mengkaji dinamika penyelenggaraan dua sistem pendidikan pada abad ke-20 di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Kedua sistem itu adalah sistem pendidikan Eropa dan sistem pendidikan Bumiputra. Sistem pendidikan Eropa yaitu pendidikan sekuler-formal yang diselenggarakan di sekolah-sekolah Eropa dan Bumiputra yang didirikan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Sistem pendidikan Bumiputra yaitu pendidikan adat dan agama yang diselenggarakan di *surau* oleh masyarakat tradisional Minangkabau. Pada studi ini, kedua sistem tersebut selanjutnya disebut sebagai dualisme pendidikan. Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan Etis, yang juga sangat berpengaruh terhadap pembangunan dalam bidang pendidikan di Sumatera Barat. Pendirian sekolah-sekolah formal untuk kalangan Bumiputra diselenggarakan bersamaan dengan perluasan birokrasi kolonial dan perkembangan sistem tanam paksa komoditas kopi di dataran tinggi Minangkabau, bahkan sebelum era Etis pada awal abad ke-20. (Grave, 2007: 153). Contohnya lembaga pendidikan rendah yang pernah didirikan paling awal di sana, yaitu *Sekolah Nagari* sejak tahun 1840 dan untuk memenuhi kebutuhan guru dari kalangan

Bumiputera, pada tahun 1856 didirikan *Normaal School* (Sekolah Guru Bumi Putera).

Pesatnya perkembangan sekolah-sekolah rendah di daerah dataran tinggi, mengakibatkan munculnya suatu sentral pendidikan, yaitu kota Bukittinggi. Bukittinggi juga merupakan kota terpenting di pedalaman Sumatera Barat, yaitu selain sebagai kedudukan Residen Padang Darat (*Padangsche Bovenlanden*), juga sebagai pusat administrasi dan perdagangan. Oleh karena itu, kota Bukittinggi memiliki daya tarik sebagai tujuan perantauan masyarakat dari daerah luar seperti Sianok, Koto Gadang, Balingka dan lainnya untuk berdagang, bekerja dan menempuh pendidikan di sekolah (Grave, 2007: 182). Pada tahun 1918, Kota Bukittinggi ditetapkan sebagai *gemeente* (otonomi terbatas). Kemudian pada tahun 1925, pemerintah mendirikan benteng di salah satu bukit di dalam kota Bukittinggi. Tempat itu dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda. Pada era itu, kawasan Fort de Kock berkembang menjadi sebuah *stadgemeente* (otonomi penuh). Pada era itu pula, nama Fort de Kock lebih populer digunakan untuk menyebut kota Bukittinggi. Pada tahun 1938, Kota Bukittinggi menyusul ditetapkan sebagai *stadgemeente* (Basundoro, 2010: 109). Dampak dari berlangsungnya kebijaksanaan Sistem Pendidikan Kolonial di Hindia Belanda, masyarakat Sumatera Barat dapat mengenal berbagai jenis dan tingkatan sekolah, baik yang langsung didirikan oleh pemerintah, para misionaris maupun pihak swasta (Albach dan Kelly, 1979: 47).

Di dalam masyarakat Minangkabau sendiri terdapat perbedaan pandangan terhadap kehadiran lembaga pendidikan sekuler di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tradisional-agamis. Sebagian kelompok masyarakat memandang kehadiran sekolah-sekolah tersebut sebagai keuntungan dan menerimanya dengan baik. Sementara itu

kelompok masyarakat lainnya menolak dan bersikap apatis (Zed, 1984: 1-2). Secara sederhana, kaum terpelajar Minangkabau dapat dibedakan atas tiga golongan berdasarkan jenis pendidikan yang didapat, yaitu: Pertama, golongan yang hanya mendapat pendidikan *surau*, yaitu mereka yang kemudian menjadi kaum alim ulama; Kedua, golongan yang hanya mendapat pendidikan sekuler, yaitu mereka yang kemudian menjadi birokrat, dokter, hakim dan profesi tinggi lainnya; Ketiga, golongan yang mendapat pendidikan *surau* dan sekuler sekaligus (pendidikan yang dualistik), yaitu mereka yang mayoritas menjadi tokoh-tokoh pergerakan nasional pada eranya (Irhas, 2016: 7).

Berdasarkan latar belakang diatas, kuat dugaan dualisme pendidikan di Bukittinggi terutama di abad ke-20, berhasil menciptakan generasi intelektual religius yang cemerlang. Artikel ini bertujuan menggali dualisme yang berlangsung secara dinamis di kota Bukittinggi. Oleh karena itu, artikel ini berusaha menjawab permasalahan berikut: (1) Bagaimana proses sejarah terbentuknya *surau* serta bagaimana bentuk dan model orisinal pendidikan *surau* yang berlangsung pada masyarakat Minangkabau? (2) Bagaimana pendidikan formal Barat diselenggarakan di Kota Bukittinggi? (3) Bagaimana respon dan adaptasi terhadap penyelenggaraan pendidikan dualistik?

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan sejumlah arsip kolonial dan sumber lainnya baik yang tergolong sumber primer maupun sekunder, yang relevan serta mengandung evidensi dan fakta sejarah. *Besluit van Gouverneur Generaal, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Gedenkboeks samangesteld bij gelegenheid van het 35 jarig bestaan der Kweekschool voor Inlandsche Onderwijers te Fort de Kock, Het Inlandsch Onderwijs ter Sumatra's Weskust, Koloniaal Verslag*, 1911, 1918,

Padangsche Bovenlanden, Sumatra's Weskust No. 126/11, *Politik Verslag Sumatra's Weskust over het jaar 1856*, swk no 122/2, *Regeering Almanak, Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, serta buku-buku terbitan sezaman maupun buku kotemporer dan dari berbagai karya ilmiah dari berbagai perguruan tinggi. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari berbagai perguruan tinggi dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) serta berbagai perpustakaan lainnya. Kemudian data-data sejarah dianalisis melalui Metode Sejarah dan dibantu dengan menggunakan pendekatan terutama meminjam konsep *surau*, dualisme, dan pendidikan. Studi ini dibatasi Kota Bukittinggi Kota Bukittinggi pada awal abad ke-20 merupakan sentral pendidikan di wilayah Padang Darat. Secara administratif, kota Bukittinggi pada era kolonial merupakan ibukota *Afdeeling Padang Darat (Padangsche Bovenlanden)*, Residensi Sumatera Barat (*Sumatra's Westkust*) dan lingkup temporal penelitian ini mencakup periode 1901-1942. Tahun 1901 dipilih sebagai awal periodisasi didasarkan pada dua hal: (1) Dimulainya kebijakan Politik Etis di Hindia Belanda terutama di bidang pendidikan; (2) Kondisi penyelenggaraan pendidikan pada periode itu lebih intensif dan variatif. Tahun 1942 sebagai akhir periodisasi didasarkan pada era berakhirnya kekuasaan kolonialis Belanda atas wilayah Nusantara, selain itu juga sebagai tanda berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Bukittinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Bukittinggi: Akses Menuju Dualisme Pendidikan

Letak dan Topografi Kota Bukittinggi

Letak astronomis kota Bukittinggi berada pada koordinat 0°.22' – 00°.29' LS dan 99°.52' – 100°.33' BT, berada di tengah pulau Sumatera yang terbentang di antara rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Posisinya sangat strategis karena terletak di persimpangan jalan yang menghubungkan kota-kota dataran tinggi lainnya, seperti Payakumbuh,

Padangpanjang, Batusangkar, Lubuksikaping. Oleh karena itu, kota Bukittinggi dapat dijangkau dalam waktu yang relatif singkat dari daerah-daerah dataran tinggi lainnya (Kielsra, 1890: 127). Sebagai pusat pemerintahan maupun pusat perdagangan dan pendidikan sejak era kolonial. Terletak sekitar 91 km di sebelah utara Kota Padang, yang menjadi pintu gerbang Sumatera Barat. Oleh karena terletak di daerah dataran tinggi, sedangkan Padang di pesisir, maka jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan kedua kota itu memiliki banyak tanjakan dan tikungan, terutama ketika memasuki daerah cagar alam Lembah Anai. Jalur kereta api itu terdiri dari tiga rel. Rel yang di tengahnya bergerigi dan berfungsi sebagai rem. Jalan raya dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1833, sedangkan jalur kereta api dibangun pada tahun 1890-an (Zulqayyim, 2005: 184).

Topografinya yang berbukit-bukit dan berlembah dengan ketinggian bervariasi antara 921 m sampai 941 m di atas permukaan laut (Joustra, 1923: 26). Bukit-bukit (*bukik*) di sana berjumlah 27, yang tersebar di dataran tinggi seluas 5,2 km. Oleh karena itu, iklimnya sejuk dengan suhu rata-rata 19°C pada malam hari dan 22°C pada siang hari. Di sebelah barat Bukittinggi terdapat lembah di antara dua tebing curam (ngarai) Sianok dengan kedalaman mencapai 110 m. Ngarai itu berkelok-kelok mengalirkan air yang dikenal dengan sungai Batang Sianok dari arah selatan ke utara (Nijhoff, 1917: 720). Topografi pada sebelah barat, utara dan barat daya merupakan daerah perbukitan. Pengaruh ini menimbulkan perbedaan kehidupan ekonomi masyarakatnya di tiap *naggari*. Apalagi *nagari* yang terletak di kaki Gunung Merapi dan Singgalang dapat dikatakan sebagai *nagari* perbukitan. Penduduk ini lebih banyak menanam tanaman keras, seperti: kopi, indigo, kulit manis, dan tanaman sayur-sayuran, seperti: kentang dan buncis. Akan tetapi karena lahan pertaniannya yang sempit, maka

sebagian besar penduduknya juga berusaha dalam bidang industri rumah tangga, seperti menenun, membuat alat-alat pertanian, kerajinan emas dan perak, dan berdagang. *Nagari* perbukitan tersebut antara lain, *nagari* Canduang, Sungai Pua, Pandai Sikek, Koto Gadang, Guguak, Malalak, Balingka, Matua, dan Kamang (Zulqayyim, 2006: 15). Perkampungan-perkampungan industri rumah tangga dan pedagang tentunya membutuhkan perkembangan ilmu pengetahuan. Akses ilmu dan pengetahuan tentunya lewat pendidikan, kuat dugaan inilah yang menjadi pendorong masyarakat di daerah ini menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda (Irhas, 2016: 47).

Bukittinggi merupakan sebuah kota dataran tinggi yang strategis sehingga mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota Bukittinggi. Karakter masyarakat Minangkabau banyak dipengaruhi falsafah adat yang dianut oleh masyarakat tidak terkecuali juga Bukittinggi. Perubahan sosial yang terjadi terjadi pada adat Minangkabau pasca perang paderi. Kolonial mengambil peluang dari pertentangan antara kaum adat dan kaum agama (kaum paderi) sehingga menjadi akses masuk penguasa lokal yang akomodatif terhadap kebijakan kolonial. "*Sakali aia gadang, sakali tapian barubah*" pepatah Minangkabau ini merupakan pemaknaan bahwa masyarakat Minangkabau dalam memahami perubahan sosial. Keterbukaan masyarakat atas hal-hal baru yang datang yang membawa kemajuan dan pembaharuan. Sifat adaptif terhadap kebaruan tersebutlah yang mendorong perubahan sosial di Bukittinggi. (Irhas, 2006: 48)

Dinamika Bukittinggi menjadi Kota Kolonial

Kota Kolonial merupakan ruang barbagai kegiatan masyarakat baik secara sosial, budaya maupun, politik dan ekonomi. Menurut Bintarto, dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu jaringan kehidupan

yang dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis. Menurut Toynbe kota tidak hanya merupakan permukiman khusus, tetapi juga merupakan suatu kompleks dan setiap kota menunjukkan perwujudan pribadinya masing-masing (Basundoro, 2013: 15). Gideon menyebut syarat mutlak lahirnya sebuah kota, yaitu adanya basis ekologi yang memadai, teknologi yang maju dan adanya suatu kompleks organisasi sosial, terutama struktur kekuasaan yang cukup maju. Sementara menurut Charles H. Cooley, kota-kota pada umumnya muncul di jaringan sistem transportasi, seperti di tempat pemberhentian transport, tempat untuk memindahkan barang yang diangkut seperti kereta api, terminal dan lainnya (Tjiptoamodjo, 1883: 22-23). Dinamika merupakan kekuatan perubahan, Menurut Piötr Sztomka dalam Ilmu Sosiologi, teori dinamika kehidupan sosial muncul dalam upaya memahami sifat dinamis masyarakat secara lebih memadai. Namun ia memerlukan pengembangan konseptual lebih lanjut dan bukti empiris yang lebih banyak. Untuk menganalisis tentang perubahan sosial, lebih baik apabila digunakan peralatan konseptual dari teori sistem dan teori dinamika kehidupan sosial. Untuk memahami masalah perubahan sosial yang kompleks diperlukan tipologi proses sosial, yang berdasarkan empat kriteria utama, yaitu: (1) bentuk proses sosial yang terjadi; (2) hasil proses sosial; (3) kesadaran tentang proses sosial di kalangan anggota masyarakat bersangkutan; dan (4) kekuatan yang menggerakkan proses tersebut (Piötr Sztomka, 2011: 13-16). Dalam kajian ilmu-ilmu sosial dan humaniora, istilah dinamika sering digunakan sebagai konsep yang mewakili suatu gerak sebagai konsep yang mewakili suatu gerak atau serangkaian proses dalam masyarakat yang bergerak secara dinamis. Dinamika sebagai bagian proses perubahan sosial menghasilkan keadaan dan struktur sosial baru, seperti munculnya pasar dan benteng.

Cikal bakal kota Bukittinggi dimulai dari sebuah pasar (Navis, 1984, 92). Menurut cerita yang dipercayai oleh masyarakat, sejarah kota Bukittinggi berawal dari sebuah pasar yang didirikan dan dikelola oleh penghulu di Nagari Kurai. Pada awalnya pasar itu diadakan setiap hari Sabtu, kemudian setelah semakin ramai diadakan pula pada hari Rabu. Pasar itu terletak di salah satu tempat yang disebut '*bukik nan tatinggi*' atau bukit yang tertinggi. Bukit yang dimaksudkan itu bernama Bukit Kubangan Kabau, yang tingginya 936 m. Sebutan itu lama-kelamaan mengalami perubahan menjadi 'Bukittinggi' (Zulqayyim, 2006: 21). Akhirnya nama Bukittinggi digunakan untuk menyebut pasar, sekaligus masyarakat dan Nagari Kurai. Sebelum kedatangan kolonialis Belanda ke daerah Dataran Tinggi Agam, pasar Bukittinggi telah ramai didatangi oleh pedagang dan penduduk di sekitarnya. (Zulqayyim, 2005: 184).

Kondisi Demografis

Sensus penduduk untuk Bukittinggi dilakukan pertama kali pada tahun 1905. Jumlah penduduk kota pada tahun itu adalah 2.239 jiwa, yang terdiri dari 1.439 jiwa Bumiputra, 258 jiwa Eropa, 347 jiwa Cina dan 195 jiwa Timur Asing. Berdasarkan sensus tersebut, diperkirakan bahwa orang Cina dan Timur Asing lainnya banyak yang bermukim di Bukittinggi. Pertumbuhan penduduk Bukittinggi yang terbesar berlangsung antara tahun 1920 hingga 1930. Selama dasawarsa itu, penduduk Bukittinggi bertambah sebanyak 9.653 jiwa atau 151,81%. Angka itu jauh di atas angka pertambahan penduduk rata-rata di kota lainnya di Sumatera Barat (Zulqayyim, 2006: 28)

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi, 1905, 1915, 1920, 1930 dan 1935

Tahun	Bumiputra	Eropa	Cina	Timur Asing	Jumlah
1905	1.439	258	347	195	2.239
1915	1.500	215	-	650	2.465
1920	3.899	399	533	173	5.004
1930	13.015	547	812	238	14.657
1935	13.012	461	789	238	14.704

Sumber: Zulqayyim, *Kota Bukittinggi Tempo Doeloe* (Padang: Universitas Andalas Press, 2006), hlm. 29 dan Departement van Economische Zaken, *Volkstelling 1930* (Batavia: Landsdrukkerij, 1935), hlm. 142.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1930, diketahui bahwa prosentase penduduk Bumiputra jauh lebih besar daripada jumlah penduduk asing lainnya. Prosentase penduduk Bumiputra adalah 88,8%, menyusul Cina 5,54%, Eropa 3,73% dan Timur Asing 1,93%. Dari jumlah keseluruhan penduduk Bukittinggi terdapat 4.587 jiwa remaja dan 6.457 jiwa dewasa (termasuk orang tua) atau sekitar 84,89%, sedangkan anak-anak di bawah umur 15,11%. Angka itu menunjukkan usia produktif cukup dominan di Kota Bukittinggi. Dapat diperkirakan bahwa tenaga kerja terserap dalam bidang pemerintahan tidaklah begitu banyak. Oleh karena itu, jumlah penduduk yang bergerak dalam perdagangan, jasa atau lainnya akan lebih dominan. (Zulqayyim, 2006: 31-32). Bukittinggi merupakan sebuah kota dataran tinggi yang strategis yang didukung masyarakatnya yang memiliki nilai-nilai keterbukaan terbuka dan karakter adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Hal ini mengakibatkan percepatan proses perubahan sosial. Perubahan sosial yang terjadi jelas mendorong Bukittinggi sebagai

pusat pendidikan dan perdagangan. Menjadi pusat pendidikan, salah satunya disebabkan karena Pemerintahan Hindia Belanda membutuhkan pegawai rendah, sehingga didirikanlah sekolah. Berdirinya Pasar mempercepat perekonomian masyarakat sehingga para pedagang. Masyarakat Bukittinggi baik pedagang yang kaya maupun anak pegawai Belanda banyak yang menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah dan sekaligus mengirim anak mereka mendalami ilmu agama. Hal ini juga menjadikan kota ini menjadi salah satu pusat perkembangan Pendidikan Islam di *surau* dan melahirkan ulama-ulama termasyhur di zamannya. (Irhas, 2016: 64).

Kebijakan dalam Ekonomi dan Pendidikan

Pada akhir abad ke-19 ekonomi *nagari-nagari* di Minangkabau mengikuti kebijakan Kolonial Belanda, kebijaksanaan yang dijalankan adalah perdagangan bebas. Beberapa macam barang dagangan seperti: lada, kopi, tembakau dan lainnya. Hasil perkebunan tersebut dimonopoli oleh kolonial Belanda dalam jumlah besar yang disimpan di gudang pusat pasar termasuk Bukittinggi. Pemimpin tradisional seperti penghulu-penghulu yang muncul sebagai pedagang perantara dengan pemerintah Hindia Belanda (Martamin, 1987: 46). Kekayaan wilayah Bukittinggi berasal dari peranannya sebagai pusat utama pengumpulan wilayah produksi kopi yang terluas pada tahun 1860-an. Para kepala pemerintahan dekat gunung memiliki pendapatan yang tinggi dari komisi kopi. Keluarga besar saudagar sudah berkembang lewat usaha pelayanan sistem transportasi kopi dan urusan ekspor barang yang dihasilkan atau dikumpulkan dari wilayah tersebut. Kebanyakan pegawai sipil dan kaum profesional dikalangan elite berasal dari nagari sekitar Bukittinggi dan sudah bersekolah di sekolah nagari. (Grave, 2007:184). Bukittinggi merupakan sebuah kota dataran tinggi yang strategis yang didukung masyarakatnya yang memiliki nilai-nilai keterbukaan dan

karakter adaptif. Hal ini mengakibatkan percepatan proses perubahan sosial di Bukittinggi. Perubahan sosial yang terjadi mendorong Bukittinggi sebagai pusat pendidikan dan perdagangan. Menjadi pusat pendidikan, salahsatunya disebabkan karena Pemerintah Hindia Belanda membutuhkan pegawai rendah, sehingga didirikanlah sekolah. Bagi masyarakat Bukittinggi ini merupakan suatu peluang baru untuk mengakses ilmu pengetahuan baru. Masyarakat Bukittinggi baik pedagang yang kaya maupun anak pegawai Belanda banyak yang menunaikan Ibadah Haji ke Mekkah dan sekaligus mengirim anak mereka mendalami ilmu agama. Hal ini juga menjadikan kota ini menjadi salah satu pusat perkembangan Pendidikan Islam di *surau* dan melahirkan ulama-ulama termasyhur di zamannya. Kota Bukittinggi dapat disebut sebagai akses menuju dualisme pendidikan karena daerah ini menjadi pusat perkembangan Islam lewat lembaga tradisional *surau*. Seiring berkembangnya menjadi kota kolonial sekaligus menjadi salah satu sentral pendidikan formal di Sumatera Barat dan tidak sedikit juga dari kaum terpelajar yang melanjutkan ke sekolah tinggi yang ada pulau Jawa bahkan ada yang sampai ke Negeri Belanda (Irhas, 2016: 68).

Perkembangan Pendidikan Surau Minangkabau

Surau merupakan sebuah bangunan kebudayaan dan adat sebelum datangnya agama Islam, yang tampaknya digunakan juga sebagai tempat ritual penganut Hindu-Budha. Karel A. Steenbrink berpendapat bahwa *surau* berasal dari India, yang merupakan suatu tempat yang digunakan sebagai pusat pengajaran dan pendidikan agama Hindu-Buddha. Di Minangkabau, sejak pemerintah Adityawarman (1356) beragama Buddha, telah didirikan sebuah biara Buddha di dekat Bukit Bombak. Di samping berfungsi sebagai tempat peribadatan biara itu juga sebagai tempat para pemuda untuk mempelajari pengetahuan suci dan tempat memecahkan

masalah-masalah sosial (Steebrink, 1994:20-21). Verkerk Pistorious seorang pejabat Pemerintahan Hindia Belanda melakukan klasifikasi *surau* berdasarkan jumlah murid dengan membagi ke dalam tiga kategori yaitu: (1) *surau* kecil, yang dapat menampung maksimal 20 murid, (2) *surau* sedang dapat menampung 80 murid, (3) *surau* besar dapat menampung antara 100 sampai 1000 murid. *Surau* kecil adalah *surau* yang terdapat di tiap *nagari* dan *kaum*. Untuk *surau* sedang dan besar didirikan sebagai tempat pendidikan Agama Islam dalam pengertian yang lebih luas yang melahirkan ulama-ulama terkenal (Pistorius, 1985: 20-22).

Menurut R.A Karn, sebagaimana dikutip Azyumardi Azra bahwa secara bahasa '*surau*' berarti 'tempat' atau 'tempat penyembahan'. *Surau* berbentuk bangunan kecil yang dibangun untuk penyembahan arwah nenek moyang. Karena alasan inilah, *surau* biasanya di bangun di puncak bukit atau di tempat yang lebih tinggi dari lingkungannya (Azra, 1999: 117). Ketika *surau* menjadi pusat pengajaran keagamaan, sebelumnya tempat tidur pemuda dalam suatu tempat yang disebut *banjur*. Di sana mereka dapat mempelajari adat, tukar-menukar informasi keduniaan dan menyibukkan diri dengan pekerjaan praktis untuk memenuhi kebutuhan komunitas di bawah pengawasan para orang tua. Akan tetapi, *banjur* sudah tidak lagi eksis, barangkali karena proses Islamisasi yang terus-menerus berlangsung. Beberapa *banjur* berubah menjadi *surau* dan yang lainnya menjadi tempat tinggal keluarga-keluarga tertentu. Keberadaan *surau* di sebuah keluarga merupakan rumah/tempat ibadah keluarga (Azra, 2003: 50). Dalam masyarakat Minangkabau, *surau* adalah sebuah bangunan sederhana yang terletak agak jauh dari *Rumah Gadang*, dan biasanya terletak di tepi sungai atau kolam ikan. Pemiliknya adalah sebuah *kaum* atau *suku* yang dibangun secara bergotong-royong oleh masyarakat *nagari*. Tempat belajar nilai-nilai moral dan 'kemandirian'

untuk anak laki-laki yang *aqil balig*. Dalam hubungannya dengan hal ini, *surau* juga sebagai tempat bermalam remaja laki-laki yang telah diatur oleh adat, karena adat tidak membolehkan remaja laki-laki tidur di *Rumah Gadang*. Di samping itu *surau* juga merupakan sebuah ruang kebudayaan yang sudah lama ada dan terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Minangkabau (Irhas, 2016: 75). Sama dengan mesjid, *surau* juga menjadi pusat pembinaan umat untuk menjalin hubungan bermasyarakat yang baik (*hablum-minan-naas*) dan terjaminnya pemeliharaan ibadah dengan *Khalik* (*hablum minallah*) (Mas'oed, 2015:1).

Sistem Pendidikan Tradisional Surau

Pertama *surau* berfungsi sebagai pelengkap struktur adat. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa *surau* berfungsi sebagai tempat bertemu, berkumpul, rapat dan tempat tidur bagi anak bagi anak laki-laki yang telah *akil baliq* dan orang tua yang telah uzur. Fungsi tersebut berkaitan dengan ketentuan adat, bahwa laki-laki yang sudah baliq dan duda tidak mempunyai kamar di *Rumah Gadang* bahkan di rumah orang tuanya sendiri. Kamar-kamar di *Rumah Gadang* hanya diperuntukkan bagi orang tua dan anak gadis (Azra, 2003: 8). Bagi setiap laki-laki yang beranjak remaja (sekitar umur 8 sampai 15 tahun) tidak boleh tidur lagi di sana. Mereka harus sudah diajarkan nilai-nilai agama dan kemandirian di *surau* dan dituntut untuk mencari ilmu lain di luar *Rumah Gadang*. Dunia *surau* adalah dunia yang sangat mengesankan bagi remaja laki-laki Minangkabau. Mereka belajar agama setelah ibadah sholat maghrib dan berakhir sampai waktu sholat Isya. Setelah Isya mereka turun ke halaman untuk belajar pencak silat. Di sinilah mereka mengenal *randai*, *shalawat*, *indang*, dan bernyanyi. Sesudah itu mereka berkumpul kembali dalam *surau* untuk mendengarkan kisah-kisah tentang adat istiadat dan penulisan

naskah-naskah *tambo* (*tambo*, *kaba* dan ajaran adat) (Irhas, 2016: 79-80).

Kedua, *surau* sebagai tempat dan lembaga pendidikan tradisional, khususnya pendidikan agama Islam dalam arti luas, yaitu termasuk masalah menyangkut kemaslahatan masyarakat umum. Oleh karena itu *surau* juga dipandang sebagai tempat sakral, yang juga mengajarkan sopan santun dan kepatuhan kepada Tuhan (Allah SWT). Oleh karena itu dalam *surau* orang harus menjaga tingkah lakunya dan berbicara sopan (Unri, 2010: 107). Ketiga, bahwa *surau* merupakan sistem pendidikan Islam dalam masyarakat Minangkabau di nagari-nagari, tidak terkecuali di Agam (Bukittinggi). Dalam praktik sistem pendidikan tersebut tidak mengenal peringkat kelas, dan masa studi minimal dan maksimal yang diharuskan. Sarana khususnya peralatan belajar yang digunakan juga masih sederhana. Dalam mengikuti pelajaran yang diberikan oleh syekh atau guru, para *urang siak* tidak menggunakan meja ataupun papan tulis. Apabila harus menulis, mereka menggunakan 'kertas' dari kulit kayu dan alat tulis tradisional. Ketika pendidikan Barat sudah diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda di Minangkabau, mulai diperkenalkan dan dipergunakan peralatan tulis menulis baru, yaitu batu tulis (*sabak*) sebagai tempat menulis, dan grip sebagai alat penulisnya. Metode utama yang digunakan dalam proses pembelajaran di *surau* adalah ceramah, membaca dan menghafal. Dalam praktik, proses belajar berlangsung dengan cara syekh duduk di tengah dengan melingkar para *urang siak* yang duduk di lantai. Metode ini disebut *halaqah*, yang dalam pesantren Jawa dikenal dengan nama metode *bandongan*. Dengan metode ini, syekh atau guru membaca dan menjelaskan isi suatu kitab agar didengarkan dan diperhatikan murid-muridnya, sementara para murid yang juga memegang buku mereka masing-masing membuat catatan pada sisi halaman kitab

atau buku catatan khusus (Irhas, 2016: 84-85).

Pendidikan Surau Sistem Peralihan

Sistem pendidikan yang diterapkan di *surau* sebelum 1900, menurut Mahmud Yunus adalah *sistem lama*. Sistem lama yang dimaksud adalah sistem *halaqah* dan cara pembelajaran dengan cara lama, yakni sebelum terjadinya pembaharuan dengan hadirnya sistem dan metode pembelajaran yang modern. Mengajarkan *Al-Quran* masih dalam bentuk *halaqah*, tanpa menggunakan bangku dan meja. Penggunaan sistem *halaqah* di Nusantara sama yang dipakai di Timur Tengah, karena Tuanku Syekh di Minangkabau itu, umumnya terlebih dahulu belajar ke Timur Tengah. Oleh karena itu, dalam penggunaan sistem *halaqah*, para ulama terpengaruh dengan sistem *halaqah* yang digunakan di Timur Tengah (Dobbin, 1989:142).

Bukittinggi (Luhak Agam) banyak melahirkan ulama besar, hal ini dipengaruhi oleh tersebarnya Surau Tarekat Naqshabandiyyah pada fase awal. Pada fase selanjutnya adalah dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian di Pasar Bukittinggi. Banyak masyarakat Bukittinggi yang pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji sekaligus belajar dan mendalami agama Islam. Inilah yang membawa pembaharuan dan modernisasi terhadap pendidikan Islam di Minangkabau. Dalam prosesnya terjadi dinamika internal yang menjadi ciri khas orang Minang yang terbuka terhadap perubahan. Ditambah lagi dengan keadaan zaman yang kala itu masih di bawah jajahan Belanda (Irhas, 2016: 93-94). Perubahan yang terjadi juga dipengaruhi oleh masuknya pendidikan yang dibawa oleh Belanda. Menurut Graves pendidikan Belanda telah melahirkan elite-elite baru di Minangkabau. Cikal bakal dari prestasi orang Minangkabau terletak pada cara mereka memberikan tanggapan terhadap kehadiran kekuasaan kolonial Belanda

sejak pertengahan abad ke-19 (Grave, 2007: x).

Pendidikan Formal Di Kota Bukittinggi

Kebijakan Politik Etis dalam Pendidikan di Hindia Belanda

Di Hindia Belanda, kampanye Politik Etis dipelopori oleh Pieter Brooshooft, seorang wartawan *De Locomotif* dan C. Th. van Deventer. Gagasan-gagasan dan kritik-kritik mereka berhasil membuka mata pemerintah kolonial untuk memperhatikan nasib rakyat pribumi yang miskin dan terbelakang (Nasution, 2011: 15). Dalam kritiknya, Van Deventer berpendapat bahwa bangsa Belanda memiliki hutang budi kepada rakyat pribumi dan menghimbau pemerintah untuk membayar hutang tersebut dengan cara memberi kesejahteraan kepada mereka (Brugmans. 1987:57-58). Sehubungan dengan hal itu, Ratu Wilhelmina dalam pidato pembukaan parlemen tanggal 17 September 1901 menyatakan bahwa pemerintah Belanda secara moral terpenggil untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat pribumi yang disebut dengan istilah '*een eereschuld*' atau hutang kehormatan. Panggilan moral itu diwujudkan dalam rumusan kebijakan Politik Etis yang dikenal sebagai Trias van Deventer, yaitu emigrasi dan irigasi dan edukasi (Niel, 2009: 16). Hanya dalam bidang pendidikan pelaksanaan kebijakan Politik Etis lebih membawa dampak yang positif bagi bangsa Indonesia, meskipun di dalamnya juga terjadi penyimpangan-penyimpangan. Namun demikian, pendidikan pada masa itu juga berkaitan dengan perkembangan perekonomian di Hindia Belanda, khususnya dalam subsektor perkebunan, pertambangan, perindustrian dan sebagainya serta perluasan birokrasi pemerintahan sehingga memang ada kebutuhan mendesak untuk penyediaan tenaga kerja yang profesional. Untuk itu perlu diselenggarakan pendidikan untuk rakyat pribumi melalui pendirian sekolah-sekolah formal yang

kemudian menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan lebih dari sekedar baca-tulis (Klinken, 2010: 43).

Penyelenggaraan Pendidikan Formal Bumiputera di Bukittinggi

Penyelenggaraan pendidikan formal di Minangkabau pada era kolonial dianggap cukup baik dibandingkan daerah lain di Sumatera, walaupun tidak lebih unggul dari pada di Jawa. Secara politis Belanda mengeskplotasi daerah jajahan Jawa sehingga pembangunan juga terpusat pada pulau Jawa. Termasuk juga dalam bidang pembangunan lembaga pendidikan dengan belum tersedianya jenjang pendidikan tinggi di Bukittinggi. Oleh karena itu, banyak lulusan pendidikan rendah dan menengah yang melanjutkan pendidikan tinggi ke Jawa dan Belanda.

Ketiadaan jenjang pendidikan tinggi di Minangkabau mengakibatkan *Kweekschool* sebagai sekolah yang paling prestisius kala itu. Akan tetapi yang menjadi keunggulan dari masyarakat Bukittinggi, adalah antusiasme penduduk bumiputera terhadap pendidikan yang sudah diselenggarakan yang sudah dimulai semenjak pertengahan abad ke-19. Kerjasama yang terjadi mendorong keberlangsungan sekolah. Oleh karena itu bahkan sekolah terus berkembang di *nagari-nagari* yang ada di Minangkabau. Demikianlah pada abad ke-20 di Bukittinggi didirikan sekolah rendah seperti, *Volkschool*, HIS dan sekolah menengah dan lanjutan *Kweekschool*, MULO. (Irhas, 2016: 125)

Dualisme Pendidikan Di Bukittinggi

Dualisme adalah pandangan realitas yang terdiri atas dua substansi yang berlainan, yang satu tak dapat dimasukkan dalam yang lain. Sementara yang dimaksud dengan Dualisme Pendidikan dalam tesis ini adalah pendidikan tradisional *surau* dengan pendidikan formal Hindia Belanda yang berlangsung di Bukittinggi pada akhir abad ke-19. Dalam perkembangan *surau*, setelah kepulangan para ulama

muda dari Mekkah pada abad ke-20, terjadi rivalitas antara *surau* Kaum Tua yang beraliran tarekat dengan Kaum Muda yang membawa pembaharuan model pendidikan *surau* (Irhas, 2016: 139).

Respons Masyarakat Minangkabau terhadap Dualisme Pendidikan

Menurut Selo Soemardjan perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk di dalamnya nilai-nilai sosial, sikap pola perilaku antar kelompok. Perubahan sosial menurut Emile Durkheim adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat (Martono, 2014: 205-266). Sistem pendidikan Barat yang diselenggarakan Pemerintah Hindia Belanda sejak pertengahan abad ke-19 di Minangkabau berdampak besar terhadap *mindset* masyarakat Bumiputera. Pendidikan Barat mengakibatkan munculnya suatu strata baru dalam masyarakat, yaitu kaum terpelajar yang mempunyai status sosial tinggi dalam masyarakat di samping ulama, pemuka adat, pedagang yang kaya. Kehadiran lembaga-lembaga pendidikan modern di Minangkabau tidak hanya berdampak pada timbulnya pengenalan dan penyerapan ide-ide mengenai modernisasi oleh masyarakat sehingga berdampak pada kehidupan sosial, politik dan ekonomi. Sehingga terjadi mobilitas kultural-ideologis meliputi dampak sosial meliputi terbukanya peluang mobilitas vertikal dalam masyarakat. Salah satunya melalui peluang kedudukan di dalam birokrasi pemerintahan. Dampak ekonomi meliputi keuntungan ekonomis dari serapan lapangan kerja di berbagai bidang. Di sisi lain, *surau* mulai dipandang semakin tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan

berkembangnya pendidikan Belanda terjadi perubahan *mindset* masyarakat yang melihat jadi guru, dokter, jaksa dan posisi jabatan di pemerintahan lebih prestisius dalam masyarakat (Irhas, 2016: 151-152).

Respons lebih lanjut dari penyelenggaraan pendidikan Barat di Bukittinggi adalah terjadinya segmentasi masyarakat. Walaupun secara umum masyarakat Bukittinggi sangat terbuka terhadap pendidikan Barat, tetapi terdapat juga yang menolak ataupun yang apatis. Secara umum memunculkan tiga kelompok dalam masyarakat. Pertama, kelompok yang setuju dengan keberadaan sekolah-sekolah Belanda, karena memberi peluang status sosial baru, jabatan dan posisi di pemerintahan. Kelompok ini terdiri dari kelompok pemimpin lokal yang berafiliasi dengan pemerintahan Hindia Belanda dan kelompok pedagang yang mempunyai pendapatan diatas rata-rata. Kedua, kelompok yang menolak karena dianggap dapat merubah tradisi di Minangkabau, yaitu kelompok pemimpin adat yang tidak mau berafiliasi dengan pemerintah, kelompok adat yang relatif tergolong sedikit. Ketiga, kelompok yang apatis adalah kelompok yang terdiri dari masyarakat petani yang mempunyai banyak tanah sehingga disibukkan bekerja kebun dan sawah. Kelompok ini tidak terlalu tertarik terhadap perkembangan sekolah. Karena disibukkan dengan kegiatan perkebunan yang secara turun temurun (Irhas, 2016: 52).

Kebijakan pemerintah Belanda untuk mengangkat anak-anak bumiputera untuk menjadi pegawai tentunya dengan mempunyai dasar pendidikan Belanda. Pemerintah Hindia Belanda membutuhkan pegawai yang bisa menulis sehingga eksploitasinya lebih efektif. Masyarakat menilai dengan pendidikan barat menaikkan strata sosial. Sekolah Belanda pada umumnya menerima anak-anak pemuka adat dan pedagang. Kelompok ini menjadi golongan intelektual yang berperan sebagai golongan perantara

(*schakel-society*) yaitu antara golongan adat dengan agama. Sebagai golongan baru, tersebut muncul di antara dominasi golongan adat dan agama dalam lapisan masyarakat Minangkabau. Mereka adalah masyarakat pribumi yang terdidik di sekolah Belanda, pendidikan telah mengubah mereka menjadi lebih modern, baik gaya hidup maupun pemikirannya (May, 1995: 16). Golongan terpelajar yang tidak permisif terhadap pendidikan dan menarik animo kaum muda bumiputera bersekolah.

Dengan keterbatasan sekolah tinggi di Sumatera Barat mendorong kaum muda yang sudah mendapatkan pendidikan lanjutan ke Pulau Jawa. Pada periode 1874-1900, sebanyak 7 murid asal Minangkabau mendaftar ke STOVIA (Sekolah Dokter Pribumi) di Batavia, dengan jumlah murid 183 di sekolah tersebut. Pada periode 1900-1914 mengalami peningkatan, di STOVIA 36 murid dari 200 pelajarnya berasal dari Minangkabau (Kato, 2005: 105). Dampak lain dari dualisme pendidikan didorong oleh antusiasme masyarakat pribumi terhadap pendidikan sehingga melahirkan lembaga pendidikan partikelir. Terjadi integrasi model pendidikan tradisional *surau* dengan Pendidikan Formal Belanda. *Surau* bertransformasi menjadi Madrasah yang diinesiasi oleh ulama Kaum Muda. Selain itu juga terjadi adopsi model pendidikan Belanda yang dilakukan oleh Muhamad Syafei yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal Minangkabau (Irhas, 2016: 154).

Munculnya Tokoh-Tokoh Intelektual Religius Asal Minangkabau

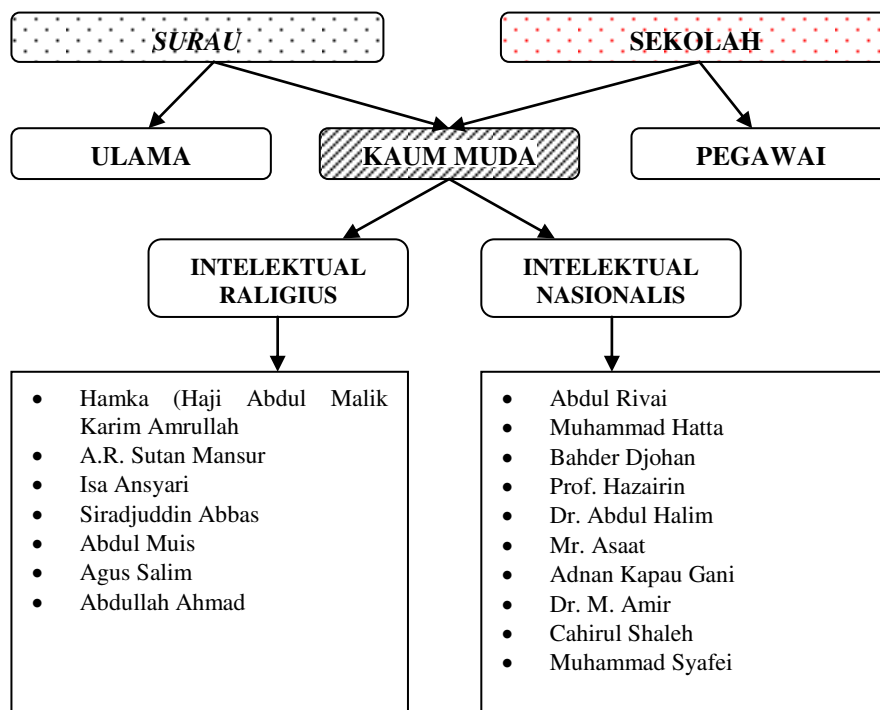
Tokoh-tokoh intelektual dilahirkan dari lembaga pendidikan yang didirikan di Bukittinggi, baik tradisional maupun formal menunjukkan bahwa masyarakat dipengaruhi oleh dualisme pendidikan. Pendidikan tradisional di *surau* membentuk karakter masyarakat Minangkabau dalam tatanan interaksi

dalam masyarakat tempat mendidik nilai-nilai adat, pola tingkah laku, dan ilmu Agama Islam. Pemuda Minangkabau diajarkan kemandirian semenjak remaja karna tradisi laki-laki tidur di *surau*. Tradisi tersebut membentuk karakter kepemimpinan dalam menghadapi kehidupan disaat mereka dewasa. Setelah dewasa laki-laki Minangkabau dituntut untuk *merantau* sehingga mendorong mereka untuk melanjutkan pendidikan ke Jawa sampai ke Belanda. Karena tidak tersedianya pendidikan tinggi di Minangkabau. Pendidikan formal Belanda memunculkan *mindset* dan wawasan baru terhadap modernisasi yang ada dalam masyarakat. Pendidikan formal juga mendorong perubahan sosial dalam lingkungan masyarakat, munculnya lembaga masyarakat organisasi keislaman yang dipelopori oleh Kaum Muda, organisasi politik yang dipelopori oleh kelompok intelektual yang berpendidikan Barat. Sistem sosial dan pola perilaku dalam antar kelompok mengalami perubahan dengan adanya modernisasi yang didapatkan lewat pendidikan barat.

Kelompok elit baru menjadi status sosial baru yang mengambil peran dalam modernisasi dalam masyarakat (Irhas, 2016: 165).

Pendidikan Hindia Belanda membuka cakrawala atau wawasan masyarakat Bumiputra di Bukittinggi dengan dunia luar. Selanjutnya, didukung oleh tradisi *merantau*, para pemuda terdorong untuk keluar ke daerah lain. Oleh karena itu banyak pemuda Minangkabau yang berdagang ke daerah-daerah lain, baik di Sumatera, Jawa dan Indonesia bagian Timur, bahkan di Malaysia dan Singapura. Sebagian di antara mereka yang merantau ke Jawa, ke Timur Tengah khususnya Mekkah dan juga Eropa khususnya Belanda yang melanjutkan pendidikan baik Agama Islam dan Pendidikan Tinggi. Mereka itu pada umumnya anak-anak dari kalangan keluarga pegawai Hindia Belanda dan pedagang. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya pendidikan tinggi di Sumatera Barat, seperti: STOVIA dan Sekolah Hakim Tinggi (*Rechts Hoge School*) di Batavia (Naim, 1979: 116).

Bagan 1. Dinamisasi dan Hasil dari Penyelenggaraan Pendidikan Dualistik



SIMPULAN

Pendidikan dualistik di Bukittinggi diselenggarakan melalui lembaga pendidikan *surau* tradisional yang kemudian melahirkan para ulama dan sekolah modern yang kemudian melahirkan para pegawai pemerintah. Masyarakat Bumiputra, terkhusus Bukittinggi yang antusias dan adaptif terhadap kehadiran pendidikan dualistik dengan menyerap pendidikan dari kedua lembaga pendidikan tersebut, sehingga muncul tokoh-tokoh intelektual religius Minangkabau. Fungsi pendidikan sebagai *agen of change* sehingga mendorong percepatan perubahan sosial di Bukittinggi dan Sumatera Barat. Dualisme pendidikan berdampak besar terhadap keberlanjutan sejarah di Bukittinggi. Berdasarkan pembahasan penulisan sebelumnya maka dapat disimpulkan:

Pertama, *surau* merupakan model pendidikan pertama yang membentuk karakter masyarakat Minangkabau di Bukittinggi. Nilai-nilai tradisi, norma dan ajaran Islam diajarkan di sana. *Surau* mengalami beberapa fase perkembangan, yaitu sejak fase awal masuknya Islam, berkembangnya aliran tarekat, fase pembaharuan oleh Kaum Paderi hingga fase pembaharuan kedua oleh Kaum Muda. Kaum Muda telah melakukan modernisasi *surau* yang dipengaruhi oleh perkembangan Islam di Mekkah. Modernisasi *surau* merupakan respons dari tersisihnya fungsi *surau* sebagai lembaga pendidikan asli sejak sekolah-sekolah Belanda berkembang sangat pesat. Pendidikan model Belanda dianggap bisa menyingkirkan posisi *surau* di Minangkabau. Dengan bekal ilmu Islam selama belajar di Mekah, Kaum Muda telah melakukan perubahan besar terhadap metode pendidikan *surau*, di antaranya mengubah sistem *halaqah* menjadi sistem kelas atau dari *surau* menjadi madrasah. Modernisasi yang terjadi di *surau* didukung pula oleh perubahan cara pandang orang Minangkabau terhadap pendidikan.

Kedua, Sekolah Barat yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda awalnya didorong oleh kebutuhan untuk tenaga pegawai rendah. Perkembangan dan reorganisasi pendidikan terus berlangsung hingga munculnya kebijakan Politik Etis pada tahun 1901. Respons masyarakat yang melihat peluang pekerjaan baru meningkatkan antusiasme untuk bersekolah. Sekolah Barat dipandang mengubah cara pandang orang Minangkabau menjadi lebih maju. Sekolah Barat menjadi faktor pendorong lahirnya kelompok baru selain kelompok agama dan adat, yaitu kelompok *schakel society* (masyarakat peralihan), yaitu kelompok intelektual yang menjadi perantara kelompok adat dan ulama. Kelompok inilah yang menjadi elite baru dan pelopor pergerakan nasional.

Ketiga, Dualisme model pendidikan yang berkembang dan membawa pengaruh terhadap perubahan sosial di Bukittinggi. Fungsi *surau* mengalami perubahan secara perlahan. Dampak terbesar terjadinya perubahan sistem pendidikan ke modern yang dilakukan oleh Kaum Muda, sehingga melahirkan lembaga pendidikan partikelir yang mengadopsi dan mengintegrasikan model pendidikan barat atau disebut juga dengan istilah sekolah kombinasi. Pendidikan dualistik telah melahirkan tokoh-tokoh intelektual religius dan nasionalis, di antaranya: Buya Hamka, Muhammad Hatta, Tan Malaka, Syahrir, Agus Salim dan lainnya. *Surau* di Bukittinggi melahirkan ulama besar dan Sekolah Barat melahirkan intelektual dan kalangan terdidik. Masyarakat Minangkabau selalu bergerak dengan cepat dan mengambil posisi terhadap perubahan-perubahan dan kebijakan yang diambil oleh Belanda.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie,
Jilid 2 (1918), Jilid 8 (1939).

*Gedenkboeks samangesteld bij
gelegenheid van het 35 jarig*

bestaan der Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers te Fort de Kock.

Het Inlandsch Onderwijs ter Sumatra's Weskust.

Koloniaal Verslag, 1911, 1918.

Regeering Almanak, 1892, Jilid 1 (Arsip Nasional Republik Indonesia).

Staatsblad van Nederlandsch-Indie, 1918.

Tijdschrift voor Nederlandsch-Indie, Zait-Bomel, Joh, Noman en Zoon, 1858.

Tesis dan Disertasi

Abdullah, Taufik, "The Kaum Muda Movement in West Sumatera, 1927-1933" (Disertasi Ph.D pada Cornell University, 1970).

Witrianto, "Dari Surau ke Sekolah: Sejarah Pendidikan di Padangpanjang, 1904-1942" (Tesis pada Universitas Gadjah Mada, 2000).

Buku dan Artikel

Abidin, Mas'ood, *Surau Kito* (Yogyakarta: Gre Publishing, 2015).

Abdullah, Taufik, "Beberapa Aspek Penulisan Lokal" dalam *Pemikiran Biografi dan Kesejarahan*; Suatu kumpulan Prasarana pada Berbagai Lokakarya, Jilid II (Jakarta: Depdikbud Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1982/1983).

_____, *Modernisasi di Minangkabau: Sumatera Barat Pada Dekade I Abad XX*, terjemahan Ishak Thaba (Padang: PKIPS-IKIP Padang, 1981).

_____, "Kearah Penulisan Sejarah Sosial Daerah" dalam *Pemikiran Biografi dan Kesejarahan* (Jakarta: ISDN, 1982).

_____, "Kearah Penulisan Sejarah Nasional di Tingkat Lokal" (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1985).

_____, "The Making of a Schakel Society: The Minangkabau In The Late Nineteent Century" dalam *Papers of the Dutch Indonesian Historical Conference held at*

Noordwijkerhout, The Netherlands, 19-22 May 1976 (Leiden/Jakarta: Bereau of Indonesian Studies, 1978).

_____, *et.al.*, *Arah Gejala dan Perspektif Studi Sejarah Indonesia* (Jakarta: Leknas-LIPI, 1980).

_____, *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulam Artikel* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

_____, dan S. Bhudisantoso, *Sejarah Sosial di Daerah Sumatera Barat* (Jakarta: Depdikbud, 1983).

Alfian, T. Ibrahim. "Tentang Metodologi Sejarah", dalam T. Ibrahim Alfian, (ed.). *Dari Babad dan Hikayat Sampai Sejarah Kritis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

Alex MA, *Kamus Ilmiah Populer Kotemporer* (Surabaya: Karya Harapan, 2005).

Amran, Rusli, *Padang Riwayatmu Dulu* (Jakarta: CV. Yasaguna, 1988).

_____, *Sumatera Barat: Plakat Panjang* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985).

Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).

Ashari, Hasan, *Zaman Keemasan Islam: Menyikap Zaman Keemasan* (Bandung: Mizan, 1994).

Asnan, Gusti, *Adabiah: Perintis Pendidikan Modern di Sumatera Barat* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2003).

Azra, Azyumardi, *Surau Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi* (Jakarta : Logos, 2003).

Barnadib, Imam, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan* (Yogyakarta: FIB IKIP Yogyakarta, 1982).

Benson, Amir, *Minangkabau Sampai Akhir Abad Ke 19* (Padang: Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, IKIP Padang, 1982).

- Basundoro, Purnawan, *Pengantar Sejarah Kota* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013).
- Baudet, H. dan Brugmans I.J., *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987).
- Booth, Anee, *Sejarah Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).
- Brugmans., I.J, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie* (Batavia: Wolters, 1938).
- Colombijn, Freek, *Kota Lama Kota Baru, Sejarah Kota-Kota di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak 2005).
- Darmiharjo, Darji, *Analisis Pendidikan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980).
- Djalaudidin, Sinar *Keemasan 2 dalam Mengamalkan Keagungan Kalimat Lailaha Illalloh* (Surabaya: Terbit Terang, tanpa tahun).
- Djojonegoro, Wardiman, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kbudayaan, 1996).
- Dobbin, Christine, *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang Sedang Berubah, Sumatera Tengah, 1787-1847* (Jakarta: INIS, 1989).
- _____, *Gejolak Ekonomi Kebangkitan Islam dan Gerakan Paderi: Minangkabau 1784-1847* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).
- Gunawan, Ary H, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara 1986).
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983).
- Graves, Elizabeth E., *Asal Usul Elite Minangkabau Modern: Respons Terhadap Kolonial Belanda Abad XIX/XX*, terjemahan Mestika Zed (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Hadler, Jeffrey, *Sengketa Tiada Putus, Matriakat, Reformis Islam dan Kolonialisme di Minangkabau* (Jakarta: Freedom Institute).
- Kahin, Audrey, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).
- Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, (Jakarta: Gramedia 1999).
- _____, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975).
- _____, *Modern Indonesia Tradition & Tranformation a Socio-Historical Perspective* (Yogyakarta: Gajah Mada University Prees, 1991).
- _____, *Sejarah Indonesia Indonesia*, Jilid I (Jakarta: Balai Pustaka, 1977).
- _____, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993).
- Kato, Tsuyoshi, *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Klinken, Gerry van, *Lima Penggerak Bangsa yang Terlupa* (Yogyakarta: LKIS, 2010).
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1979).
- May, Eni, *Shakel-Society dan Tumbuhnya Nasionalisme di Minangkabau Abad XIX* (Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas, 1995).
- Mansoer, M.D., *Sejarah Minangkabau* (Jakarta: Bhatara, 1970).
- Mardanas, Syafwan dan Kutoyo Sutrisno, *Sejarah Pendidikan di Sumatera Barat* (Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan, 1980/1981).
- Marsden, William, *Sejarah Sumatera*, terjemahan Tim Komunitas Bambu (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008).

- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial, Perspektif Klasik, Modern dan Poskolonial*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Martamin, Marjani, *Sejarah Daerah Tematis Zaman Kebangkitan Nasional di Daerah, 1900-1942*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Departemen P dan K 1977/1978.
- Naim, Mochtar, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 1979).
- Nashir, Zulhasril, *Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007).
- Nasution. S, *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Bandung: Jemmars, 1983).
- , *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011).
- Navis, A.A, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau* (Jakarta: Grafiti Pers, 1984).
- Niel, Robert van, *Munculnya Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984).
- Nizar, Samsul, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran* (Jakarta: Quantum Teaching, 2005).
- Noer, Deliar, “Pembaharuan Islam di Minangkabau Sesudah Tahun 1900”, *Prosiding Seminar Masuknya Islam di Minangkabau*. Padang, 1969.
- Poesponegoro, Mawarti Djoenod dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Indonesia*, Jilid V (Jakarta: Balai Pustaka, 1993).
- Sarijo, Marwan, *Bunga Rampai Pendidikan Islam* (Jakarta: Anissco, 1996).
- Sumarsono, Mestoko, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari Zaman ke Zaman* (Jakarta: Dep. P dan K, BP3K).
- Sjamsudin, Helius, *Metologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2007).
- Suminto, Aqib, *Politik Islam Hindia Belanda* (Jakarta: LP3S, 1985).
- Sutherland, Heather, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1983).
- Steenbrink, Karel A, *Pesantren, Madrasah dan Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3S, 1994).
- Sztomka, Piör, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Prenada, 2011).
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1996).
- Zed Mestika, *Kolonialisme, Pendidikan dan Munculnya Elite Minangkabau Modern: Sumatera Barat Abad Ke-19* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1984).
- Zulqayyim, *Bukittinggi Tempo Doeloe* (Padang: Andalas University Press, 2006).